

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia secara normatif pada dasarnya bersumber dari ajaran agama yang universal. Konsisten dengan prinsip ini, pendidikan Islam akan mampu bertahan dalam perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Prinsip universal itu menunjukkan kesanggupannya untuk di satu sisi mempertahankan semangat keislamannya dan di sisi lain menyesuaikan aspek teknisnya dengan perkembangan zaman. Sebagaimana dapat dilihat dalam sejarahnya, pendidikan Islam memperlihatkan variasi dari satu periode ke periode lain, dan dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi dengan semangat keislaman yang permanen.

Masa depan pendidikan Islam di Indonesia ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, dunia pendidikan Islam pada dasarnya masih menghadapi problem pokok berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan. Hal ini terkait dengan program pendidikan dan pembinaan tenaga pegawai yang kurang selektif. Di samping itu ada hal-hal yang sangat mendasar dan krusial di dunia pendidikan Islam, di mana pendidikan Islam di Indonesia belum dapat memosisikan diri secara utuh dan mandiri, lepas dari kerangka pendidikan umum seperti yang terjadi saat ini. Peraturan Perundang-Undangan pendidikan, kurikulum, sistem evaluasi bahkan sampai masalah teknis

Secara eksternal, masa depan pendidikan Islam dipengaruhi oleh tiga isu besar yaitu globalisasi, demokratisasi dan liberalisasi Islam. Globalisasi tidak semata-mata mempengaruhi sistem pasar, tetapi juga sistem pendidikan. Penetrasi budaya global terhadap kehidupan masyarakat Indonesia akan direspon secara berbeda-beda oleh kalangan pendidikan.

Demokratisasi merupakan isu lain yang mempengaruhi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Tuntutan demokrasi mengarah pada sistem pengelolaan berbagai bidang, termasuk didalamnya bidang pendidikan. Jika sebelumnya sistem pendidikan bersifat sentralistik, seragam dan dependen, maka belakangan berkembang tuntutan pengelolaan pendidikan lebih otonom, beragam.

Di samping itu, tuntutan partisipasi masyarakat khususnya dalam pengawasan mutu pendidikan semakin meningkat yang menuntut pengelolaan pendidikan yang transparan dan bertanggungjawab. Termasuk dalam tuntutan demokratisasi ini adalah menggeser paradigma pendidikan sehingga lebih menekankan pada peran siswa secara aktif.

Dua kebijakan pokok yang telah ditetapkan pemerintah untuk mendongkrak kualitas pendidikan melalui "Gerakan peningkatan mutu Pendidikan" diharapkan dapat menumbuhkan kecakapan anak didik sesuai dengan kebutuhan lokal dalam persepektif global (*act locally think globally*). Pertama hal yang menyangkut efisiensi pengelolaan pendidikan, pemerintah telah menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) kedua untuk lebih memacu akselerasi peningkatan

Masalah liberalisasi, agama Islam telah berkembang dan dipeluk oleh berbagai komunitas yang sangat beragam dan kompleks. Hal ini meniscayakan adanya proses dialektika antara ajaran Islam dengan kondisi lokal sehingga menghasilkan pemahaman agama secara fungsional yang berlaku dalam lingkungan pemeluknya. Sementara dalam perkembangan mutakhir tidak mendapatkan penjelasan yang tegas dalam teks-teks suci, dalam hal ini muncul tuntutan liberalisasi Islam.

Sejalan dengan uraian di atas, dan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, mengantisipasi perubahan-perubahan global pada persaingan pasar bebas, serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pemerataan pelayanan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan dan demokratis (*democratic education*). Hal tersebut harus dikondisikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat agar terjadi proses pembelajaran yang menyenangkan (*joyfull learning*).

Dengan iklim yang demikian, diharapkan pendidikan mampu melahirkan calon-calon penerus pembangunan masa depan yang sabar, kompeten, mandiri, kritis rasional, cerdas, kreatif dan siap menghadapi berbagai macam tantangan, dengan tetap bertawakal terhadap sang pencipta-Nya. Bahwa apa yang dihadapi, apa yang terjadi merupakan kehendak Ilahi yang harus dihadapi dan disyukuri.

Untuk kepentingan tersebut diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan nasional, yang dipandang oleh berbagai pihak sudah tidak efektif, dan tidak mampu lagi memberikan bekal, serta tidak dapat

Perubahan mendasar tersebut berkaitan dengan kurikulum, yang dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan berbagai perubahan pada komponen-komponen pendidikan lain.

A. Problema Pendidikan Keagamaan di Madrasah

Tujuan nasional negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut terutama mamajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilaksanakan pembangunan nasional yang mencakup berbagai bidang. dan sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang handal untuk berbagai bidang, perlu adanya pendidikan berbagai ilmu, baik yang duniawi maupun yang menyangkut akhlak dan moral.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia, di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, bangsa Indonesia perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang

... intensif, efektif dan efisien dalam

proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah bersama kalangan swasta telah dan terus berupaya mewujudkan hal tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Persoalan kualitas atau mutu pendidikan tidak hanya dialami bangsa Indonesia, tetapi hampir semua negara yang melaksanakan desentralisasi pendidikan, seperti Filipina, Myanmar, Vietnam, India, Srilanka, Kamboja, dan Mongolia juga mengalami hal yang sama. Salah satu parameter untuk mengukur mutu pendidikan seperti disebutkan di atas adalah hasil ebtanas/NEM. Menurut Human Development Index (HDI), saat ini Indonesia berada pada urutan ke-109 dari 174 negara dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) – (Kompas, 18 April 2002 hal. 20).

Indikator lain dari mutu pendidikan dapat dilihat dari data UNESCO (2000)

Yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan dan penghasilan per kapita yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia yang makin menurun. Diantara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998 dan ke-109 tahun 1999.

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, guru memegang peranan yang sangat menentukan. Mutu dan dedikasi guru merupakan kunci keberhasilan proses belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas akademik, profesionalisme dan dedikasi bagi setiap guru perlu terus ditingkatkan. Disamping itu perlu diwujudkan suatu sistem penilaian kinerja yang adil, transparan dan accountable secara periodik, serta adanya jaminan kesejahteraan, keamanan, keselamatan dan martabat bagi profesi guru.

Diantara berbagai komponen pendidikan, selain guru dan biaya pendidikan, kurikulum merupakan komponen yang paling banyak mendapat sorotan, terutama jika terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dalam hal kompetensi lulusan. Sorotan yang paling sering terdengar adalah apakah dengan adanya konsep baru yang diperkenalkan seperti "life skills", kurikulum yang ada perlu diubah atau tidak. kecenderungan yang ada adalah keinginan mengubah kurikulum karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat. Misalnya, Wakil Presiden menyoroti kurikulum dengan menyatakan bahwa kurikulum seyogyanya dirombak total karena dianggap "sudah tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dalam upaya keluar dari krisis multidimensi

Pergantian kurikulum sebenarnya merupakan suatu proses yang wajar, yang dilakukan manakala kurikulum yang ada tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Dengan berlakunya waktu, kebutuhan dan tuntutan masyarakat juga berubah sehingga kurikulum pun harus berubah. Waktu lima tahun untuk perubahan sebuah kurikulum dianggap waktu yang wajar. (Suparman, dkk, 2002:2). Namun, tidak jarang terjadi perubahan kurikulum dilakukan tanpa landasan atau kajian yang kuat, sehingga perubahan hanya didasarkan pada perbedaan pandangan dan konflik kepentingan di kalangan pejabat pengambil keputusan. Kondisi seperti ini menimbulkan keraguan di masyarakat, yang tercermin dengan munculnya ungkapan : "ganti pejabat, ganti kurikulum". Tudingan yang paling sering dilontarkan untuk mengubah kurikulum adalah bahwa kurikulum yang ada tidak relevan atau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Padahal, belum tentu ketidaksesuaian tersebut belum tentu terletak pada kurikulum, tetapi pada implementasinya, yaitu bagaimana cara guru mengemas, mengelola, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Inilah yang sering disebut sebagai "hidden curriculum", yang efeknya acapkali lebih perkasa dari kurikulum formal. (Joni, 2000).

Perubahan kurikulum hampir selalu mengundang gejolak, baik di tingkat sekolah maupun di kalangan orang tua. Di sekolah, dengan berubahnya kurikulum, para guru harus menyesuaikan wawasan dan acuannya dengan kurikulum baru, harus mempelajari kembali pengemasannya dalam kegiatan instruksional, dan

biaya, terutama yang berkaitan dengan buku pelajaran. Anak-anak mereka akan menuntut buku pelajaran baru karena buku pelajaran yang ada tidak dipakai lagi. Padahal, sebenarnya peristiwa seperti itu tidak perlu terjadi. Buku paket yang ada semestinya akan dimanfaatkan karena hanya merupakan sumber pelajaran. (Suparman, dkk, 2002:2).

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1975 dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Sebagai tindak lanjut dari dua SKB tersebut di atas, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 101 Tahun 1994, tentang Kurikulum Madrasah Aliyah. Dari langkah-langkah kebijaksanaan yang telah ditempuh dan setelah diadakan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan pada Madrasah yang telah berjalan selama ini, Pemerintah menganggap perlu untuk melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pendidikan pada Madrasah Aliyah Pilihan Ilmu-Ilmu Agama, sehingga diharapkan dapat menghasilkan siswa yang memiliki bekal pengetahuan dasar dalam ilmu-ilmu agama dan Bahasa Arab yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke IAIN dan atau dapat bekerja di masyarakat dalam bidang pelayanan keagamaan. Sehubungan dengan itu, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI, Nomor : 73 Tahun 1987, tanggal 30 April 1987, tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus. Dan didukung pula dengan berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem

pedoman pelaksanaannya, maka Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Berlakunya Sistem Pendidikan Nasional tersebut menyebabkan perlu penyesuaian dalam penyelenggaraan administrasi sekolah terutama penyesuaian Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan yang sesuai dan sejalan dengan kondisi saat ini.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka pembaharuan kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan sudah merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan khususnya yang menyangkut Aspek/Komponen Seleksi dan Organisasi bahan dan isi Pelajaran baik dari segi struktur programnya maupun dari segi materi pengajaran. Dengan adanya pembaharuan atau perubahan kurikulum ini diharapkan eksistensi Madrasah Aliyah Keagamaan akan terjadi pencerahan dari segi kualitas lulusan.

B. Perumusan Masalah

1. Permasalahan Penelitian

Sejak keluarnya keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tentang Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah, Lampiran II tentang Garis-garis Besar Program Pengajaran dan lampiran III tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum, perlu diadakan suatu kajian khusus yang mampu

... dan ... sehingga ... dapat

dirumuskan suatu Kurikulum yang mantap, kredibel dan antisipatif terhadap perubahan-perubahan sosio kultural masyarakat.

Permasalahan yang timbul dan perlu dirumuskan dalam penelitian ini menyangkut berbagai aspek/komponen Kurikulum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Aspek/komponen seleksi dan organisasi bahan dan isi pelajaran baik dari struktur programnya dari segi materi pengajaran.
- b. Bagaimana implementasinya kurikulum tersebut baik di dalam pelaksanaan Proses belajar mengajar maupun di dalam dunia akademik dan masyarakat.
- c. Hambatan dan kendala-kendala di lapangan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut.
- d. Apakah perubahan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menformat ulang kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK)

2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian ini diharapkan dapat diketahui :

- a. Sejauh mana pelaksanaan dan kesesuaian seleksi dan organisasi bahan dan isi pelajaran baik dari struktur programnya maupun dari segi materi pelajaran.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Yogyakarta baik di dalam pelaksanaan

proses belajar mengajar maupun dalam dunia akademik dan masyarakat.

- c. Untuk mengetahui sejauh mana hambatan dan kendala-kendala di lapangan dalam pelaksanaan kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Yogyakarta.
- d. Untuk mengetahui perubahan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memformat ulang kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Yogyakarta.

3. Kegunaan Penelitian

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan masukan bagi segenap civitas akademika Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) dalam rangka perbaikan dan terus meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).
- b. Bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijaksanaan nasional yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) pada khususnya.
- c. Bahan pertimbangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam memformat kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).
- d. Bahan masukan bagi penentu kebijakan bahwa aspek/komponen kurikulum yang perlu ditinjau ulang dan direvisi adalah aspek seleksi dan organisasi bahan dan isi pelajaran baik dari struktur programnya

4. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian tentang kurikulum Madrasah telah banyak diteliti, seperti Ahmad Zayadi (1999) yang merupakan penelitian tesis dengan judul Sistem Pendidikan di Pondok Peanteren Gontor Ponorogo (Tinjauan tentang kurikulum pendidikan dan penerapannya). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan gambaran tentang pengembangan kurikulum *Kulliyatu-l-Mu'amallimin Al-Islamiyah Pondok Moderen Gontor (KMI PMG)* dan penerapannya, sehingga jelas dalam Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum KMI PMG dikembangkan dengan pedoman pada *al-hifzhu-bi-l-qadimi-i-shalih wa-l-akhdzu bi-l-jadidi-l-ashlah*. Isi kurikulumnya yang nampak, relatif tidak berbeda dengan kurikulum madrasah pada umumnya, sekiranya berbeda hanyalah pada adanya kurikulum yang terselubung (*hidden curriculum*), yaitu penekanan pada bahasa Arab, strategi belajar-mengajar, adanya falsafah hidup yang diteladankan, keikhlasan dalam berbagai aspek kehidupan, kedisiplinan dan kepatuhan, rasa kesamaan derajat, hak dan kewajiban, pendidikan kebangsaan yang berbhineka tunggal ika dan dikenalnya pada bermacam-macam mazhab dalam fiqih beserta argumentasinya.

Penelitian tesis lainnya adalah Zamzuri Umar (1999) tentang Evaluasi Implementasi Program Asrama dalam Madrasah Terpadu, Studi Kasus di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta bertujuan ingin mengungkapkan bagaimana proses dan hasil implementasi program

Yogyakarta yang dimulai sejak tahun 1980. Program asrama terpadu adalah menetapkan asrama terpadu adalah menempatkan asrama sebagai subsistem pendidikan madrasah yang tidak terpisah karena setelah pemerintah menetapkan madrasah setara dengan sekolah umum pada tahun 1975, MMM menghadapi beberapa kendala mengikuti kurikulum baru yang sangat minim bobot pelajaran agamanya. Bila tetap mempertahankan komponen pelajaran agama seperti semula, maka jumlah program kurikulum seluruhnya menjadi amat berat. Oleh karena itu diadakan modifikasi program pelajaran dengan mengacu pada kurikulum pemerintah agar tetap diakui statusnya dan dapat mengikuti Ebtanas, tetapi komponen pelajaran agama sebagai ciri khas MMM tetap tidak berkurang. Untuk mengatasi problem beban kurikulum yang di atas beban madrasah negeri, maka dikembangkan madrasah terpadu dengan asrama di MMM dan semua siswa wajib berasrama. Program ini disebut asrama terpadu di asrama diselenggarakan bimbingan, pengayaan pembelajaran dan bimbingan mental spiritual, jenjang kelasnya enam tahun merupakan persamaan tingkat SLTP dan SLTA dalam satu paket.

Sri Hartini (2002) dalam penelitian tesisnya yang berjudul Evaluasi Program Madrasah Aliyah Keagamaan (studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri I Surakarta) menguraikan bahwa banyak peserta didik yang tidak memenuhi kualifikasi dan bahkan ada yang sebagian harus pindah jurusan

Keagamaan. Di sisi lain masih banyak tenaga pengajar yang jurang berkualitas.

Asep Suryana dan Dede Suryadi (2002) dalam artikel yang berjudul Kurikulum, Dinamika Sosial Politik dan Otonomi Daerah; Kasus Pesantren Pertanian Darul Fallah, Bogor menguraikan pergeseran dan pemandatan kurikulum pesantren pertanian Darul Fallah sebagai respon terhadap perubahan sosial ekonomi dan politik yang dihadapinya. Artikel ini berpijak pada dugaan bahwa pergeseran dan pemandatan kurikulum tersebut dipengaruhi oleh perubahan tingkat *society* (Perubahan sosial dan ekonomi) dan perubahan di tingkat *state* (perubahan politik dan kebijakan standarisasi sistem pendidikan nasional). Pendidikan menengah Darul Fallah awalnya bersifat eksperimen dengan nama Pendidikan Pertanian Rakyat yang kemudian berubah menjadi Madrasah Aliyah Umum Terpadu (MAUT) – nama resmi setelah mengintegrasikan diri pada Departemen Agama. Pada tahun 1975, Pesantren Darul Fallah menyelenggarakan pendidikan tingkat Aliyah selama 3,5 tahun dan baru pada tahun 1994 Darul Fallah mengintegrasikan dirinya menjadi bagian dalam standar pendidikan nasional yang dikoordinasikan oleh Departemen Agama. Penelitian ini meneliti tentang pergeseran dan pemandatan kurikulum ketrampilan pada kurikulum 1971, 1983, 1992 dan 1999. Dalam rentang perubahan kurikulum ini terjadi pergeseran yang sangat signifikan baik dalam bentuk maupun jumlahnya.

Dalam penulisan tesis ini, judul yang kami angkat adalah Aktualisasi Pendidikan Islam (Telaah kritis terhadap kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan Yogyakarta). Penelitian ini ingin memberikan gambaran dan mengkritisi tentang pelaksanaan kurikulum tersebut dari aspek/komponen seleksi dan organisasi bahan dan isi pelajaran. Judul ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih detail, hal ini dilatarbelakangi adanya anggapan masyarakat yang perlu dikaji ulang dimana Madrasah ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan, hal ini disebabkan :

- a. Kurikulum Madrasah terlalu sarat beban. Kurikulum Madrasah memang sama dengan sekolah umum bila dilihat dari strukturnya, namun dari segi materi pengajaran Madrasah lebih banyak muatannya seperti halnya mata pelajaran Qur'an-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqh, Sejarah dan Peradaban Islam dan Bahasa Arab bahkan pada Struktur Pendidikan Pengembangan Keilmuan masih ada pelajaran Tafsir-Ilmu Tafsir, Hadits-Ilmu Hadits, Ushul Fiqh, Tarikh Tasyri', Ilmu Kalam dan Sejarah Agama, belum lagi dari mata pelajaran bahasa, dimana diajarkan Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis.
- b. Kurikulum Madrasah belum mengacu pada pangsa pasar. Kenyataan di lapangan sampai saat ini khususnya dibursa tenaga kerja baik di lingkungan lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta

Madrasah masih diterlantarkan dengan berbagai alasan seperti relevansi ijazah, spesifikasi kebutuhan dan skill yang dibutuhkan.

- c. Perlu diakui bahwa secara obyektif mutu pendidikan di Madrasah masih rendah dibanding dengan sekolah umum, indikatornya dapat dilihat pada perolehan NEM pada saat berlakunya Ebtanas, khususnya untuk mata pelajaran Eksakta seperti matematika, fisika dan biologi, juga berdasarkan penelitian daya serap kita masih rendah.
- d. Atas dasar tiga hal tersebut diatas pada gilirannya Madrasah masih menempatkan posisi Madrasah pada pilihan kedua bahkan ketiga sesudah sekolah umum negeri, swasta favorit, swasta baru pilihan terakhir masuk ke Madrasah. Kenyataan ini disebabkan oleh beberapa hal yang belum mendukung di lingkungan Madrasah seperti kondisi fisik, sarana dan prasarana pergedungan dan peralatan, tenaga kependidikan dan anggaran Madrasah yang rata-rata kondisi di Madrasah masih berada dibawah sekolah-sekolah yang dikelola oleh Departemen Pendidikan.

Latar belakang inilah yang membedakan tinjauan pustaka dari penulisan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, sehingga terlihat jelas walaupun telah banyak penelitian-penelitian tentang

C. Landasan Teori

Dunia pendidikan sangatlah dinamis tumbuh berkembang seiring dengan kemajuan peradaban dan budaya bangsanya. Terlebih di era globalisasi ini, pengaruh antar negara sudah sedemikian kuatnya seakan memburu dan tak jelas dinding penyekatnya entah di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Tuntutan masyarakat yang semakin kuat akan peran pendidikan mendorong agar penyelenggara negara dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Departemen Agama maupun mengantisipasi gejolak kemajuan zaman tersebut.

Sebagai Negara yang berdaulat Negara kita telah mempunyai landasan yang kuat akan dasar-dasar pendidikan ini sehingga kita tidak mudah terpengaruh dari implikasi globalisasi yang bersifat negatif. Dasar-dasar itu jelas terkandung didalam dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dalam Bab XIII pasal 31 dan 32 disebutkan :

Pasal 31 :

Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran

Ayat 2. pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang

Pasal 32 : Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia

Didalam GBHN 1993 disana secara jelas dan terinci bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dibahas secara khusus dibawah ini kami

PENDIDIKAN

- Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan Bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun diri masyarakat dan bangsanya.
- Tujuan Pendidikan Nasional antara lain disebutkan : Untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berbudipekerti luhur berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, berdisiplin, ber etos kerja, profesional, bertanggungjawab, produktif serta sehat jasmani dan rohani.
- Menyangkut penataan dan pengembangan pendidikan (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Sebagai pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pemerintah pada tanggal 27 Maret 1989 telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu : PP Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, PP Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan tinggi. Disamping itu pemerintah juga

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

Selanjutnya sebagai tindak lanjut lahirnya berbagai macam peraturan-peraturan dibidang pendidikan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri sebagai aturan tehnis dalam pelaksanaan di lapangan, seperti halnya Menteri Agama telah mengeluarkan KMA Nomor 373 tahun 1993 tanggal 22 Desember 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah, dan mulai diberlakukan di Madrasah sejak tahun ajaran 1994/1995 yang terkenal dengan kurikulum 1994 yang merupakan babak baru dalam sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia setelah berturut-turut pemerintah menggunakan kurikulum 1968, kurikulum 1976 dan kemudian kurikulum 1984 yang kemudian disempurnakan dengan KMA Nomor 45 tahun 1987 dan terakhir kurikulum 1994.

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap perubahan kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan yang signifikan sehingga dapat mendongkrak kondisi Madrasah agar dapat duduk sejajar dengan sekolah-sekolah umum di lingkungan Departemen Pendidikan. Upaya-upaya kearah perbaikan kurikulum dan kesejajaran antara pendidikan di lingkungan Departemen Agama seperti Madrasah dengan sekolah-sekolah umum di lingkungan Departemen Pendidikan terus dibenahi seperti halnya, terbitnya berbagai Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan, penanganan Ebtanas bersama, penyediaan guru-guru bidang studi umum dari Departemen Pendidikan dari pihak

Dari uraian tersebut diatas diharapkan cepat atau lambat Madrasah akan mampu mengejar ketertinggalannya bahkan kalau mungkin Madrasah lebih maju dari yang lain. Kita yakin dengan etos kerja yang tinggi dan didukung dengan perbaikan diberbagai komponen pendidikan Insya Allah hal ini menjadi kenyataan.

D. Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan uraian tentang metodologi, yakni cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, sekaligus proses pelaksanaannya. Hal-hal yang akan dijelaskan adalah : pendekatan penelitian, penentuan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan derajat kredibilitas penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa yang menjadi titik pusat perhatian atau fokus penelitian ini, adalah mengenai kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) di Indonesia. Agar data tentang Kebijaksanaan Pendidikan Agama di Indonesia dan kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) diperoleh secara intensif, dituntut

2. Penentuan Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Kebijakan Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan. Pemilihan subyek penelitian ini didasarkan atas hasil studi pendahuluan (MAK) memiliki karakteristik tersendiri di bandingkan dengan Madrasah Aliyah Umum dan Sekolah Menengah Umum (SMU) lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah materi pendidikan, metode pendidikan dan lain-lain yang berbeda dengan SMU pada umumnya. Subyek penelitian terdiri dari kebijaksanaan pendidikan islam di Indonesia dan kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Adapun Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) yang akan kita jadikan subyek penelitian ini adalah MAN Yogyakarta I meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan kurikulum, rekayasa kurikulum maupun implementasinya, dan hal-hal tertuang di dalam perumusan masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu :

a. Pengamatan

Metode pertama yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah pengamatan. Metode pengamatan ini sangat penting, karena kemungkinan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lengkap,

b. Wawancara

Wawancara di dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak dapat diabaikan kehadirannya. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam, yaitu pertemuan langsung secara berulang-ulang antara peneliti dengan para ahli yang sangat mengetahui tentang subyek penelitian agar, diperoleh data-data yang lebih akurat dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dalam menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti mengikuti saran yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo (1986), yaitu bahwa sebelum menelaah isi dokumentasi, terlebih dahulu mengecek : (1) Keaslian dokumen, (2) kebenaran isi dokumen, (3) relevan tidaknya isi dokumen dengan maksud dan permasalahan penelitian. Setelah peneliti yakin dan mantap, barulah memutuskan penggunaan dokumen dimaksud.

4. Teknik Analisis Data

Menurut HB. Sutopo (1996) dalam penelitian kualitatif proses kegiatan analisisnya dilakukan bersama dengan proses pelaksanaan analisis penelitian kualitatif, yaitu (a) model analisis jalinan atau mengalir

(b) model analisis interaktif (miles dan

Model analisis yang digunakan dalam kegiatan ini adalah : model analisis interaktif yang mempunyai tiga komponen kegiatan, yaitu : (a) reduksi data, (b) sajian data, (c) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dengan tiga komponen analisisnya saling menjalin dan dilakukan secara terus menerus dalam proses pengumpulan data.

Model analisis di atas sesuai dengan pendapat Patton (1980), yang dikutip kembali oleh Moleong (1999:103), analisis data ialah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Menafsirkan adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pada uraian, dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian. dan dalam penelitian ini analisis data meliputi empat komponen kegiatan, yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Ada tiga macam analisis kuantitatif. Yaitu : *descriptive statistics* (statistik deskriptif), *correlational analysis* (analisis korelasi), dan *hypotheses testing* (tes hipotesis), (brinkerhoff, 1983).

a. Statistik deskriptif (*Deskriptive statistics*)

Statistik deskriptif distribusi frekuensi, ialah sejumlah skor (biasanya skor mentah) yang telah diurut sedemikian rupa dari yang terendah sampai yang ke tertinggi, dan banyaknya individu atau atau satuan lain yang memiliki nilai. Distribusi frekuensi biasanya disajikan dalam

b. Analisis korelasi (*Correlational analysis*)

Memberikan estimasi tentang ukuran dan petunjuk hubungan linear antara dua variabel, dan dapat berupa angka. Analisis ini tidak memberikan estimasi bagaimana satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel yang lain.

c. Pengujian hipotesis (*Hypotheses testing*)

Kalau ada terdapat informasi untuk dua kelompok orang atau lebih, umpama untuk mereka yang mengikuti lokakarya dan mereka yang tidak ikut lokakarya. Informasi ini dapat dipakai untuk memperkirakan apakah kelompok tersebut memang berbeda. Pengujian hipotesis adalah cara untuk menentukan apakah perbedaan yang ditemukan antara kelompok memang betul atau hanya kebetulan.

5. Derajat Kredibilitas Penelitian

Menurut Lincoln dan Guba (1985), tingkat kepercayaan suatu penelitian diukur dengan empat kriteria, yaitu : (1) kredibilitas, (2) transferabilitas, (3) dependabilitas, dan (4) konfirmabilitas. Terdapat banyak teknik untuk memeriksa tingkat kepercayaan tersebut salah satunya dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi.

Triangulasi merupakan proses untuk mengadakan pengecekan terhadap kebenaran data dengan cara membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian pustaka, pada waktu yang berlainan, dan dengan menggunakan metode yang